

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN MEDAN MARELAN

Nina Hastina¹⁾
Dahnir Harahap²⁾

¹⁾ Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Jln. H.A. Manaf Lubis Tj. Gusta Kota Medan Kode Pos 20123,.. Email: Ninahastina4@gmail.com

²⁾ Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Jln. H.A. Manaf Lubis Tj. Gusta Kota Medan Kode Pos 20123,.. Email: Niar.harahap20@gmail.com

Abstrak: Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah umum menempatkan siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan SD penyelenggaraan pendidikan inklusif. Subjek penelitian meliputi SDN No. 064999 Medan Marelan. Pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan perlu tindakan refleksi dan perbaikan pada komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu (1) Tenaga Pendidik khusus untuk guru pendamping khusus (GPK). (2) Saranan dan Prasana yang belum menyesuaikan kebutuhan ABK secara keseluruhan.(3)Keuangan/Dana dari pemerintah untuk penyelenggara pendidikan inklusif.(4) Evaluasi tingkat daerah dan Nasional (UN) khusus untuk sisiwa ABK di sekolah reguler.

Kata Kunci: Evaluasi, Komponen, Pendidikan Inklusif, ABK

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya. Tarmansyah (2009), “Fenomena Pendidikan Inklusif merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua anak (Education for All) denganfokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemisahan”. Pendidikan inklusif menghendaki jaminan pendidikan bagi semua siswa tanpa terkecuali. Pendidikan Inklusif tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, merupakan “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Bandi, Delphie (2009:17) mengemukakan bahwa layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah mendapatkan kesempatan untuk belajar di kelas-kelas umum berdasarkan kemampuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dengan beberapa modifikasi. Anak-anak

berkebutuhan khusus dapat mengikuti program-program pembelajaran yang ada di sekolah bersama-sama dengan anak normal lainnya. Ilahi, Takdir Muhammad (2013:26) mengemukakan bahwa di Indonesia pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal lainnya di sekolah reguler yang terdekat dari rumah sehingga anak berkebutuhan khusus sebisa mungkin tidak dipisahkan dengan lingkungannya. Kustawan, Dedy (2012 :7) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Pendidikan dipengaruhi oleh proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh faktor-faktor (komponen). Menurut PKLK Pendidikan Dasar (2013:22) Komponen-komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah

“(a) Perencanaan sistem pendidikan inklusif : komponen perencanaan sistem pendidikan inklusif meliputi kurikulum, pendidik, peserta didik, sarana prasarana, keuangan, lingkungan dan alternatif penempatan. (b) Implementasi sistem pendidikan inklusif : merencanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, membina hubungan antar pribadi, dan evaluasi pembelajaran pelaksanaan pendidikan inklusif”.

Berdasarkan hasil penelitian Suryani Ima dan Zaini (2014) “Persepsi guru reguler dalam pelaksanaan sistem operasional pendidikan inklusif secara umum di SMPN Se Kota Madya Surabaya. Pelaksanaan operasional pendidikan inklusif di SMPN Kota Surabaya kurang maksimal karena tenaga pendidik dari PLB masih sangat minim dibandingkan siswa ABK yang memerlukan layanan. Persepsi guru reguler terhadap hambatan penyelenggaraan pendidikan Inklusif di SMPN Se Kota Madya Surabaya yaitu mengenai tenaga pendidik, kurikulum ABK, kegiatan belajar mengajar serta sarana dan prasarana”.

Selanjutnya Tarmansyah (2009) “ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan guru adalah kurikulum reguler, guru masih belum memahami cara mengasesmen kemampuan anak dengan gangguan penglihatan, kurikulum belum dimodifikasi oleh guru sesuai dengan kebutuhan anak demikian juga metode yang digunakan guru dalam mengajar sifatnya masih klasikal belum memberikan layanan individual”.

Sejak pemerintah memperkenalkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah, wacana tentang pendidikan inklusi telah menarik perhatian banyak kalangan, khususnya para penyelenggara pendidikan. Semakin meningkatnya perhatian terhadap pendidikan inklusif tidak secara otomatis implementasinya berjalan secara lancar. Akan tetapi, berbagai pandangan dan sikap yang justru dapat menghambat

implementasi pendidikan inklusi makin beragam. Pertanyaan tentang bagaimanakah profil implementasi pendidikan inklusif di Indonesia serta hambatan yang dapat menghambat implementasi pendidikan inklusif patut mendapat perhatian. Hal tersebut sesuai dengan deklarasi Sumatera Utara (Sumut) sebagai provinsi pendidikan inklusif di Indonesia.

Kota Medan menjadi salah satu kota penyelenggara pendidikan inklusif di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Di salah satu kecamatan Medan yaitu Medan Marelan pada tahun 2016 telah mendapatkan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Oleh karena itu dilaksanakan penelitian evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SD Negeri 064999 Medan Marelan. Tujuan dari evaluasi ini untuk dapat direfleksikan dari evaluasi yang dilaksanakan dan bermanfaat untuk perbaikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bagi ABK di Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SDN No. 064999 Medan Marelan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berupa data kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru, wali murid, kepala sekolah yang dijadikan sumber penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan metode pokok berupa : (1) Observasi langsung. (2) Wawancara dilakukan kepada

kepala sekolah, guru dan wali murid. (3) Metode bantu berupa dokumentasi. Data – data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan langsung dari lapangan. Teknik yang digunakan di antaranya angket, lembar observasi, penilaian dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan mengikuti logika pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan penelitian evaluasi diuraikan berdasarkan komponen-komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai berikut :

a. Modifikasi Kurikulum

- (1) Modifikasi waktu dengan menambahkan waktu khusus untuk mengulang atau mundur kembali materi pembelajaran yang telah dilaksanakan secara klasikal diulang secara pribadi sesuai siswa berkebutuhan.
- (2) Modifikasi isi materi dengan materi sesuai kurikulum dan materi sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
- (3) Modifikasi pembelajaran masih secara klasikal
- (4) Modifikasi sarana dan prasarana dengan mengubah aturan duduk, mengubah susunan meja dan bangku, mengubah letak papan tulis.
- (5) Modifikasi lingkungan dengan cara merubah lingkungan belajar di dalam kelas dan luar kelas.
- (6) Modifikasi pengelola kelas masih secara klasikal

- b. Tenaga Pendidik khusus untuk guru pendamping khusus (GPK)

Tenaga pendidik khusus atau disebut guru inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini hanya ada satu orang guru pendamping khusus dalam satu sekolah dengan latar belakang tidak dari guru

sekolah/pendidikan luar biasa. Guru pendamping masih sangat perlu pembekalan dan pelatihan pemantapan pemahaman dan kemampuan dalam pembelajaran,identifikasi kebutuhan khusus siswa serta melaksanakan asesmen pada siswa berkebutuhan khusus.

Tabel 1. Data Tenaga Pendidik

Sumber Data SDN 064999

Status		Jabatan										Jumlah			
Kepeg.	Ka.		Guru												
			Kelas		Agama		Penjas		Bhs. Ing		Inklusif				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P		
	1.PNS	1		11		1		1					14	14	
2.Non PNS			2		1	1		1		1	1	5	6		
Jlh	1		13		2	1	1		1		1	18	20		

Berdasarkan tabel 1. Dapat dilihat jumlah guru pendamping khusus atau guru Inklusif hanya ada 1 tenaga guru dalam satu sekolah.

- c. Peserta didik

Peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima menjadi siswa di sekolah

penyelenggra inklusif ini dibatasi kuota jumlah dan jenis kebutuhan khususnya oleh pihak sekolah dengan latar belakang kemampuan sarana prasarana sekolah, tenaga pendidik dan dana.

Tabel 2. Data Siswa yang Memiliki Kebutuhan Khusus

Jenis ABK	Jumlah siswa berkebutuhan khusus												Jumlah	
	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
A														
B			1										1	
C					1								1	
C1	1	1											1	1
D														
D1														
E														
F														
G														
H			3		4	1	3	1	2	1	1	2	13	5

Jlh 1 1 4 5 1 3 1 2 1 1 2 16 6
Jlh . 22

Sumber Data SDN 06499

Keterangan Tabel

Keterangan jenis kebutuhan khusus :

- A Tunanetra
- B Tunarungu, Tunawicara
- C Tunagrahita Ringan (IQ = 50 – 70)
- C1 Tunagrahita Sedang (IQ = 25 -50)
- D Tunadaksa Ringan
- D1 Tunadaksa Sedang
- E Tunalaras (disruptive), HIV, AIDS & Narkoba
- F Autia, dan Sindrom Asperger
- G Tunaganda
- H Kesulitan Belajar/Lambat Belajar (antara lain : Hyperaktif, Dysgraphia/Tulis, Dyslexia/Baca, Dysphsia/Bicara, Dyscalculia/Hitung, Hyspraxia/Motorik).

Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan bahwa siswa berkebutuha khusus berada pada setiap rombongan kelas. Namun penempatan siswa berkebutuhan khusus di tempatkan di kelas khusus penuh untuk siswa berkebutuhan khusus, jika setelah diasesmen dapat kembali ditempatkan di kelas reguler bersama siswa reguler. Dapat diketahui jenis kebutuhan khusus siswa di setiap rombongan belajar dengan jenis kebuthan khusus yang berbeda-beda yaitu ; Tunarungu satu siswa, tunagrahita ringan 1 siswa, tungarahita sedang 2 siswa dan siswa yang kesulitan belajar (hyperaktif, kesulitan baca, tulis, berhitung dan berbicara) 18 orang.

d. Saranana dan Prasana yang belum menyesuaikan kebutuhan ABK secara keseluruhan seperti melayani setiap kebutuhan khusus siswa dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa ABK serta sarana prasarana yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

e. Keuangan/Dana dari pemerintah untuk penyelenggara pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara sejak tahun 2010 sekolah mendapatkan dana bantuan khusus untuk penyelenggara pendidikan inklusif dan mendapat bantuan operaional sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun, tahun 2014 sekolah sudah tidak mendapatkan dana khusus penyelenggara pendidikan inklusif dari pemerintah. Setelah tidak ada bantuan dana dari pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan implementasi pendidikan inklusif di sekolah ini telah berubah. Namun masih tetap mempertahankan penyelenggaraan inklusif dan menerima siswa berkebutuhan khusus yang mendaftar di SD ini.

f. Perencanaan dan Evaluasi

(1) Perencanaan

Perencanaan yang dilaksanakan guru dalam bentuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran belum ada modifikasi seperti tambahan rencana

pelaksanaan pembelajaran individu bagi siswa berkebutuhan khusus. Perencanaan tidak ada dalam bentuk tulisan oleh guru secara sistematis terarah capaian pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

(2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilaksanakan masih secara klasikal sesuai dengan perencanaan kurikulum umum. Namun, dengan modifikasi waktu dan materi terhadap siswa berkebutuhan khusus.

(3) Evaluasi

Evaluasi untuk tingkat sekolah, telah disesuaikan guru dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa berkebutuhan khusus. Namun, untuk tingkat pemerintah daerah dan nasional seperti soal Ujian Nasional (UN) khusus untuk siswa ABK di sekolah reguler. dalam evaluasi penilaian hasil belajar dan ketuntasan belajar belum terdapat soal-soal dan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) bagi siswa berkebutuhan khusus.

g. Alternatif penempatan

Penempatan siswa berkebutuhan khusus ditempatkan dalam satu kelas khusus yang terdapat siswa dengan tingkat kelas I hingga kelas VI siswa berkebutuhan khusus belajar dalam satu kelas yang sama. Hal ini mengakibatkan pembelajaran siswa dengan perbedaan rombongan belajar menjadi klasikal secara menyeluruh hanya dengan kebutuhan literasi bagi anak dalam membaca permulaan yang

menjadi prioritas utama pada siswa berkebutuhan khusus di SDN ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya dalam penelitian ini dapat ditarik simpulan yaitu terdapat beberapa komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian untuk refleksi dan perbaikan dari hasil evaluasi dari komponen berikut ;

- Tenaga Pendidik khusus untuk guru pendamping khusus (GPK).
- Saranan dan Prasana yang belum menyesuaikan kebutuhan ABK secara keseluruhan.
- Keuangan/Dana dari pemerintah untuk penyelenggara pendidikan inklusif.
- Evaluasi untuk soal Ujian Nasional (UN) khusus untuk siswa ABK di sekolah reguler.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

Kepada pemerintah, untuk terus dapat mendukung penyelenggara pendidikan inklusif agar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat tetap menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan sesuai pedoman dan idealnya pendidikan inklusif serta dapat bertambah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif khususnya di Sumatera Utara dan kota Medan.

Kepada sekolah, untuk selalu mengevaluasi dan merevisi implementasi pendidikan inklusif agar dapat menjadi

sekolah contoh penyelenggara pendidikan inklusif serta sekolah yang belum menyelenggarakan dapat dengan segera menyelenggarakan.

Terimakasih kami sampaikan untuk Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (DPRM KEMENRISTEKDIKTI) untuk dukungan moril dan materil dalam pendanaan pelaksanaan dan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Devy, Pramudiana Ika. 2017. Impelementas Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK di Surabaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*. (Online), Jilid 5, No. 1

Elisa, Aryani Syafrida. 2013. Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. (Online), Jilid 2, No. 01

Handayani dan Angga. 2013. Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*.(Online), Jilid 39, No. 1.

Illahi, Muhammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif : Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-ruzz media.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2013. Jakarta; Sekretariat Negara.

PKLK Pendidikan Dasar. (2013). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (sesuai permen diknas no.70 tahun 2009)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar.

Prastiono. 2013. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Administrasi Publik*.(Online), Jilid 11, No. 1.